

# COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN MASJID AGUNG MADANIYAH KABUPATEN KARANGANYAR

**Resta Oktafia Dwi Cahyani, Retno Suryawati**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Sebelas Maret

email: [resta\\_oktafia21@student.uns.ac.id](mailto:resta_oktafia21@student.uns.ac.id)

## Abstrak

Satu kebijakan yang dibuat dalam mewujudkan misi dari RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 khususnya dalam peningkatan kualitas keagamaan yaitu dengan adanya kebijakan revitalisasi pembangunan Masjid Agung Karanganyar. Trend positif ditunjukkan setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Dampak positif ini ada dikarenakan oleh keberhasilan sebuah perencanaan yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses collaborative governance dalam sebuah perencanaan pembangunan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Aspek Kajian menggunakan teori dari Bryson dan Crosby (2006). Pada aspek proses collaborative governance dengan indikator: (1) Membuat kesepakatan bersama, (2) membangun kepemimpinan, (3) membangun legitimasi, (4) membangun kepercayaan, (5) mengelola konflik, (6) perencanaan. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan dengan analisis triangulasi sumber dan teknik yang dilakukan terhadap beberapa orang. Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan sejumlah narasumber mulai dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar ini menunjukkan bahwa kolaborasi telah berjalan sesuai dengan proses kolaborasi menurut Bryson & Crosby (2006) dengan adanya kesepakatan bersama, membangun kepemimpinan, membangun legitimasi, membangun kepercayaan, mengelola konflik dan perencanaan.

**Kata Kunci :** *collaborative governance*, perencanaan, pembangunan

## Abstract

*One policy made to realize the mission of the 2018-2023 Karanganyar Regency RPJMD, especially in improving religious quality, is the policy of revitalizing the construction of the Karanganyar Grand Mosque. A positive trend was shown after the policy was implemented. This positive impact exists due to the success of planning carried out previously. This research aims to determine the process of collaborative governance in planning the development of the Great Madaniyah Mosque, Karanganyar Regency using descriptive qualitative research methods. The study aspect uses theory from Bryson and Crosby (2006). In the aspect of the collaborative governance process with indicators: (1)*

*Making mutual agreements, (2) building leadership, (3) building legitimacy, (4) building trust, (5) managing conflict, (6) planning). The technique for determining informants uses purposive sampling with data collection techniques through interviews and documentation. Next, the data analysis technique uses the Miles and Huberman model with stages of data reduction, data presentation, and conclusion. Data validation was carried out by source triangulation analysis carried out on several people. The results of research conducted with several sources from the government, private, and community sectors involved in planning the construction of the Great Madaniyah Karanganyar Mosque show that collaboration has proceeded by the collaboration process according to Bryson & Crosby (2006) with mutual agreement, building leadership, establishing legitimacy, building trust, managing conflict and planning.*

**Keywords:** *collaborative governance, planning, development*

## **Pendahuluan**

Pembangunan infrastruktur tidak lagi dipahami hanya sebatas tahapan perencanaan perubahan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki aspek-aspek kehidupan di masyarakat, tetapi juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur diperlukan sebuah kerangka kebijakan yang digunakan dalam menjalankan struktur kelembagaan organisasi, sistem pengawasan, penatalaksanaan organisasi, sistem pengembangan SDM, sistem akuntabilitas, serta kerangka peraturan perundangan. Salah satu bentuk dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan percepatan kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah, salah satunya di Kabupaten Karanganyar. Salah satu kebijakan yang dibuat dalam mewujudkan misi ke 5 dari RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 ini khususnya dalam peningkatan kualitas keagamaan yaitu dengan adanya kebijakan revitalisasi pembangunan Masjid Agung Karanganyar. Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018. Dan selanjutnya kegiatan revitalisasi pembangunan Masjid Agung Karanganyar ini dimasukkan sebagai bagian dari program dan kegiatan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023.

Dalam proses kebijakan publik, salah satu tahap yang perlu dilaksanakan supaya kebijakan dapat mencapai tujuan yaitu dengan tahapan implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan ini membutuhkan sebuah perencanaan yang matang agar tujuan yang dimaksudkan dapat tercapai. Sebuah perencanaan yang baik dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan apabila perencanaan tersebut dapat dilaksanakan

atau diimplementasikan (Bagu, 2022). Proses perencanaan ini tidak mempunyai awal dan akhir yang definitif (Webber, 1963 dalam Jumroh, 2021). Proses perencanaan akan terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan selalu menyesuaikan dengan kondisi yang terus menerus muncul dalam waktu tertentu dengan tujuan yang positif.

Berdasarkan dari pemahaman perencanaan diatas memperlihatkan bagaimana sebuah tren positif dari implementasi kebijakan pembangunan Masjid Agung Madaniyah yang ada di Kabupaten Karanganyar, karena adanya perencanaan yang tepat. Dimana tidak ada peningkatan kepadatan arus lalu lintas yang signifikan terjadi. Padahal jika dilihat dari lokasi keberadaan masjid tersebut, masjid ini sendiri terletak pada kawasan yang strategis dan cukup padat dengan aktivitas masyarakat baik dari perkantoran pemerintah, aktivitas PKL yang cukup banyak, dan tempat hiburan warga Karanganyar karena letaknya yang bersebelahan dengan alun-alun kabupaten. Lalu Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar yang saat ini dijadikan tempat wisata religi yang berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung atau wisatawan, sehingga jumlah kendaraan juga mengalami peningkatan namun hal tersebut juga tidak memberikan dampak yang terlalu besar terhadap lalu lintas yang ada di depan masjid tersebut.

Sebuah efek positif dari implementasi pembangunan ini karena banyaknya pihak yang terlibat baik dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Baik dari sektor pemerintah, masyarakat, maupun swasta untuk dapat memberikan masukan dan informasi yang tidak dapat ditangani sendirian. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan ini yaitu diantaranya Pengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pengelola parkir yang ikut merasakan dampak dari pembangunan ini, DPUPR Kabupaten Karanganyar selaku pihak yang menjalankan proses operasional pembangunan, OPD-OPD lainnya yang ikut terlibat khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dan Dinas Perdagangan Kabupaten Karanganyar yang memiliki tanggungjawab dalam menjalankan segala urusan terkait dengan arus lalu lintas dan PKL-PKL yang ada, kemudian juga pihak swasta yang dilibatkan yaitu CV. Prospek Investa Marta selaku pihak konsultan perencanaan yang bertanggungjawab dalam segala bentuk konsep perencanaan masjid ini.

Dengan adanya berbagai peran dan tanggungjawab akan dapat membantu pelaksanaan perencanaan pembangunan yang diharapkan berjalan dengan baik dan tidak merugikan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Melalui banyaknya kepentingan yang dimiliki setiap *stakeholder* yang terlibat, maka dibutuhkan sebuah kerjasama yang baik antara para *stakeholder* tersebut (Pamungkas, 2013).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nawawi (1984) dalam Saleh (2020) kolaborasi adalah cara yang dilakukan secara sadar dalam menggapai tujuan bersama melalui pembagian tugas/pekerjaan, namun bukan sebuah bentuk pengotak-ngotakan kerja, namun masih dapat dinilai menjadi kesatuan kerja yang memiliki arah tertentu dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, dengan adanya kolaborasi ini dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kemampuan atas pelaksanaan pekerjaan dan pendanaan yang besar, penyediaan asset kerja maupun menyelesaikan masalah yang hadir tidak dapat diselesaikan secara individu namun perlu pihak lain. Seperti halnya dalam pembangunan masjid agung madaniyah ini yang merupakan salah satu mega proyek dari pemerintah Kabupaten Karanganyar yang tentu tidak dapat diselesaikan secara individual namun perlu melibatkan pihak lain.

Dengan adanya *collaborative governance* menjadi salah satu alternatif terbaik agar tujuan dari rencana yang diharapkan dapat berjalan secara optimal. Dari penelitian yang dilakukan oleh Fajri, dkk (2021) terkait dengan *collaborative governance*, diketahui bahwa dengan adanya *collaborative governance* ini akan memberikan peluang bagi *stakeholder* untuk bersama-sama melakukan pengelolaan maupun perencanaan dalam satu forum meskipun memiliki kepentingan masing-masing. Para pihak tersebut telah memiliki persepsi terkait dengan proses kolaborasi ini. Sehingga tinggal bagaimana komitmen dari masing-masing pihak untuk mewujudkan itu terutama dari pihak-pihak yang teridentifikasi sebagai *key players* serta yang menjadi titik informasi permasalahan yang ada (Fajri, dkk 2021).

Oleh karena itu, urgensi dari penelitian ini yaitu mengkaji mengenai proses *Collaborative Governance* yang dilakukan antar *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar yakni dengan melihat dari masing-masing peran *stakeholder* tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya literatur tentang pentingnya proses *collaborative governance* khususnya dalam perencanaan pembangunan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam setiap proses perencanaan dilihat dari berbagai sudut pandang *stakeholder* terkait kedepannya sehingga tercipta lingkungan yang inklusif untuk semua pihak di daerah Kabupaten Karanganyar. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses *collaborative governance* dalam perencanaan pembangunan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar? Untuk teori yang digunakan yaitu proses *collaborative governance* menurut Bryson & Crosby (2006) dengan indikator membuat kesepakatan bersama, membangun kepemimpinan, membangun legitimasi, membangun kepercayaan, mengelola konflik, dan perencanaan.

## Metode

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang berupaya dalam mendefinisikan, meringkas berbagai kondisi, situasi ataupun fenomena yang menjadi objek dalam penelitian, sehingga memiliki upaya dalam menarik realitas yang ada ke permukaan dengan kondisi dan situasi tertentu (Bungin, 2008). Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan teori *collaborative governance* dari Bryson & Crosby (2006) yang terdiri dari 6 indikator. Dalam pemilihan informan atau narasumber, menggunakan teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* dengan tolok ukur yang didasarkan pada narasumber yang terlibat dalam perencanaan pembangunan ini. Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini validitas data diperoleh dengan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menggunakan teknik Miles & Huberman (1984) dalam Sugiyono (2019) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

Pembangunan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu bagian dari program dan kegiatan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023. Sebelum melaksanakan program tersebut tentu melalui tahapan perencanaan yang matang dan jelas. Untuk mencapai keberhasilan sebuah rencana maka dibutuhkan sebuah peran dan kontribusi dari berbagai pihak lain untuk dapat bekerjasama dan memberikan informasi dan masukkan yang tidak dapat dijalankan oleh satu sektor saja. Pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan masjid agung ini yaitu dari sektor pemerintah, swasta, hingga masyarakat. *stakeholder* yang terlibat yaitu diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Karanganyar yang merupakan pihak operasional pembangunan masjid. Kedua, Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar wilayah masjid. Ketiga, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar sebagai pihak yang mengatur para pedagang yang ada di sekitar kawasan pembangunan masjid. Keempat, CV. Prospek Investa Matra sebagai pihak konsultan perencanaan. Kelima dan keenam yaitu Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pengelola parkir di sekitar wilayah alun-alun sebagai pihak yang terdampak dari adanya pembangunan. Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara terkait *Collaborative Governance* dalam Perencanaan Pembangunan

Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar, peneliti menggunakan teori milik Bryson dan Crosby (2006) terkait dengan kolaboratif antar sektor yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dengan 6 indikator yaitu membuat kesepakatan bersama, membangun kepemimpinan, membangun legitimasi, membangun kepercayaan, mengelola konflik, dan perencanaan. Berikut analisis bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan:

1. Membuat kesepakatan bersama

Dalam sebuah proses kolaborasi, tentu dibutuhkan sebuah pembahasan mengenai tujuan bersama yang akan ditentukan dan memperhatikan mengenai bagaimana aktor yang terlibat dalam kerjasama ini memiliki kekuatan yang sama agar seimbang dan tidak terdapat aktor yang dominan pada proses kolaborasi perencanaan pembangunan ini. Dalam proses membuat kesepakatan bersama dalam perencanaan pembangunan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar ini setiap *stakeholder* memiliki teknis yang berbeda. Dimana untuk kesepakatan bersama antara pemerintah yang diwakilkan oleh DPUPR Karanganyar dan swasta yaitu perusahaan CV. Prospek Investa Marta sebagai penyedia jasa konsultan perencanaan dilakukan melalui MOU atau kontrak kerjasama yang telah dilakukan dan disepakati di awal sebelum memulai setiap tahapan perencanaan. Kemudian antar perangkat daerah yang terlibat kesepakatan dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat yang telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Karanganyar, sehingga kekuatan aktor dapat seimbang dan tidak mendominasi karena memiliki lingkup masing-masing, yaitu DPUPR Karanganyar yang memfokuskan tujuan dan kekuatannya khusus pada pembangunan masjid, kemudian Disdagperinaker Karanganyar berfokus pada PKL yang ada di sekitar masjid, dan Dishub Karanganyar yang berfokus pada segala kelancaran lalu lintas di sekitar wilayah tersebut. Untuk kesepakatan bersama dengan masyarakat ini dilakukan secara pasif karena kurang dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan, dan pihak masyarakat ini lebih menerima segala bentuk kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.

2. Membangun kepemimpinan

Sebuah aspek yang berkaitan dengan bagaimana peran pemimpin dalam mewujudkan sebuah kolaborasi pada tiap tahapan perencanaan pembangunan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar ini dengan menjalankan tugasnya dengan baik dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam proses

*collaborative governance* dalam perencanaan pembangunan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar, diketahui bahwa kepemimpinan yang telah dilakukan oleh setiap *stakeholder* sudah berjalan dengan baik dengan memastikan bahwa setiap tugas yang diamanatkan telah dijalankan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. terlihat bahwa seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi perencanaan pembangunan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar telah membangun kepemimpinan dengan baik dengan menjalankan perannya masing-masing dan kolaborasi dapat berjalan dengan lancar. Dimana DPUPR menjalankan tugasnya dan kewajibannya sebagai pihak yang menjalankan proses operasional pembangunan dengan baik, OPD-OPD lainnya yang ikut terlibat khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dan Dinas Perdagangan Kabupaten Karanganyar yang memiliki tanggungjawab dalam menjalankan segala urusan terkait dengan arus lalu lintas dan PKL-PKL yang ada juga telah menjalankan segala bentuk kewajibannya dengan kepemimpinan yang terarah. Kemudian juga pihak swasta yang dilibatkan yaitu CV. Prospek Investa Marta selaku pihak konsultan perencanaan yang bertanggungjawab dalam segala bentuk konsep perencanaan masjid ini juga telah menyelesaikan tugasnya dengan baik.

### 3. Membangun legitimasi

Dalam proses kerjasama perencanaan pembangunan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar, legitimasi ini penting untuk dibangun agar keberadaan kerjasama tersebut tetap hidup dengan menggunakan struktur, proses, dan strategi yang disesuaikan dengan lingkungan kelembagaan tersebut. Legitimasi ini sebagai interaksi untuk membangun sebuah kepercayaan dalam hubungan kerjasama antar para *stakeholder* yang terkait dalam kerjasama. Dalam proses *collaborative governance* pada perencanaan pembangunan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar, diketahui bahwa dalam memperoleh legitimasi antar *stakeholder* didapatkan dengan cukup mudah mengingat pembangunan ini merupakan proyek pemerintah. Selain itu OPD-OPD yang ada dalam menjalankan pembangunan ini secara penuh mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dari pihak swasta (konsultan perencana) dalam mendapatkan legitimasi ini dilakukan dengan melihat hasil-hasil pekerjaan yang telah mereka selesaikan sebelumnya dengan baik, sehingga keberadaannya diakui dan dipercaya kembali untuk menjalankan proyek pembangunan masjid ini.

### 4. Membangun kepercayaan

Kepercayaan diperlukan dalam menjalin sebuah kerjasama lintas sektor. Dengan adanya rasa saling percaya terhadap satu sama lain antar aktor maka kerjasama tersebut akan berhasil mencapai tujuan bersama. Dalam proses kolaborasi dalam perencanaan pembangunan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar diketahui bahwa setiap *stakeholder* yang terlibat memiliki cara untuk membangun kepercayaan dengan *stakeholder* lain dengan cara masing-masing. Hal tersebut menjadikan kolaborasi yang terjadi dapat berjalan dengan baik sehingga pada akhirnya mencapai apa yang diinginkan. Dalam membangun kepercayaan pada proses kolaborasi ini, DPUPR Kabupaten Karanganyar sebagai aktor utama dalam pembangunan ini sudah melakukan pendekatan kepada seluruh aktor sehingga dapat dibangun sebuah rasa saling percaya diantara pihak-pihak yang terlibat dan mendukung keberjalanan perencanaan pembangunan masjid agung madaniyah kabupaten karanganyar. Kemudian untuk membangun rasa percaya ini juga telah dilakukan oleh dinas-dinas lain yang ikut terlibat yaitu dengan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga pihak lain utamanya dari masyarakat dapat menaruh penuh kepercayaan mereka kepada pemerintah. Begitupun dengan pihak konsultan dalam membangun kepercayaan ini dengan menjalankan kewajibannya sesuai prosedur dan bekerja dengan baik sehingga tidak ada keragu-raguan dari pemerintah kepada pihak mereka. Dalam proses kolaborasi ini, rasa percaya juga telah tertanam kepada pihak masyarakat baik dari PKL maupun petugas parkir kepada pemerintah maupun konsultan perencana.

#### 5. Mengelola konflik

Indikator ini memiliki pengertian yaitu usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam mencegah, menghindari, dan mengurangi resiko adanya konflik selama proses kolaborasi antar *stakeholder*. Adapun dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa dalam memmanage konflik pada proses kolaborasi dalam perencanaan pembangunan masjid agung madaniyah karanganyar ini yakni dilakukan dengan selalu melakukan koordinasi antara semua pihak. Selain itu juga agar tidak terjadi konflik ini maka para pemangku kepentingan khususnya dari pihak pemerintah harus memiliki alternatif solusi yang ditawarkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dalam kolaborasi pembangunan ini.

#### 6. Perencanaan

Perencanaan dalam proses kolaborasi perencanaan pembangunan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar ini dalam hal menentukan visi,

misi, tujuan, tahapan pelaksanaan, keterlibatan dan peran antar sektor guna menghasilkan tujuan yang diharapkan dari kerjasama tersebut. Indikator perencanaan pada proses kolaborasi dalam perencanaan pembangunan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar, semua pemangku kepentingan yang ada dalam kolaborasi ini memiliki tujuan dalam perencanaan yang sama yaitu mewujudkan pembangunan yang baik dan maksimal. Hal ini dilakukan dengan cara menjalankan peran dan kewajiban masing-masing aktor dengan penuh tanggungjawab dan solusi-solusi yang diberikan yang nantinya tidak merugikan salah satu pihak.

## Penutup

Berdasarkan hasil temuan dan analisis dari penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembangunan Masjid Agung ini memiliki tujuan utamanya yaitu untuk memperkuat identitas Kabupaten Karanganyar sebagai kabupaten yang agamis, maju dan berbudaya. Dalam mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut maka proses ini melibatkan pihak lain yang kemudian disebut dengan *collaborative governance*. Dalam menganalisis kolaborasi dalam perencanaan pembangunan ini, peneliti menggunakan teori milik Bryson dan Crosby yang membagi proses *collaborative governance* ini menjadi 6 indikator yaitu membuat kesepakatan bersama, membangun kepemimpinan, membangun legitimasi, membangun kepercayaan, mengelola konflik, dan perencanaan. Didapatkan hasil bahwa para aktor sudah memenuhi keenam indikator tersebut utamanya dari para aktor pemerintah dan swasta, namun hasil yang didapatkan partisipasi masyarakat dalam proses kolaborasi ini kurang maksimal. Dimana pada indikator pertama, proses membuat kesepakatan awal dimana pemerintah menggunakan MOU atau kontrak kerjasama dengan pihak swasta dan juga Peraturan Daerah yang mengatur tupoksi masing-masing OPD. Lalu untuk partisipasi masyarakat sendiri mereka memang tidak diikutsertakan dalam semua tahapan perencanaan pembangunan masjid agung ini, namun dalam pengembangan pembangunan ini pemerintah tetap membutuhkan pendapat masyarakat dalam keputusan perencanaan pembangunan. Pada Indikator kedua, proses membangun kepemimpinan dimana para aktor telah menjalankan kewajiban sebagai pemimpin dengan baik dan bertanggungjawab. Indikator ketiga, proses membangun legitimasi, dimana para aktor memperoleh legitimasi dengan mudah karena pembangunan ini merupakan proyek pemerintah dan pihak swasta pun dalam mendapatkan legitimasi juga cukup mudah karena telah diakui dari hasil-hasil pekerjaan mereka sebelumnya. Kemudian pada indikator keempat, proses membangun kepercayaan dimana para aktor sudah mempercayai untuk melaksanakan kerjasama antar seluruh pihak dalam perencanaan pembangunan ini. Selanjutnya indikator kelima, proses mengelola

konflik dimana dilakukan dengan selalu melakukan koordinasi antara semua pihak. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya konflik yang terjadi. Pada indikator terakhir yaitu indikator keenam, proses perencanaan dimana semua aktor yang ada dalam kolaborasi ini memiliki tujuan dalam perencanaan yang sama yaitu mewujudkan pembangunan yang baik dan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan cara menjalankan peran dan kewajiban masing-masing aktor dengan penuh tanggungjawab.

### Referensi

- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 3rd edn. Bandung: Alfabeta.
- Saleh, C. 2020. Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. *Pustaka Universitas Terbuka*, 1.
- Pamungkas, G. 2013. Ekowisata Belum Milik Bersama: Kapasitas Jejaring Stakeholder dalam Pengelolaan Ekowisata (Studi Kasus: Taman Nasional Gunung Gede Pangrango). *Journal of Regional and City Planning*, 24(1): 49.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018
- Jumroh, M.S., & Pratama, M. Y. J. 2021. *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Bagu, I. Q. H. 2022. Dasar-Dasar Perencanaan. *Pengantar Ilmu Manajemen*, 9.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. 2006. The design and implementation of Cross-Sector collaborations: Propositions from the literature. *Public administration review*, 66, 44-55.
- Bungin & Burhan. 2008. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Fajri, H., Maani, K. D., Wahyuni, N., & Malau, H. 2021. Collaborative Governance Sebagai Solusi Dalam Tata Kelola Pemberdayaan Nelayan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(2).